

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Ade Saptomo, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum, Unesa University Pres, Surabaya, 2007.

Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 19.

Bagir Manan, Ketentuan-Ketentuan Mengenai Peraturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul di Tinjau Dari Perspektif UUD 1945, makalah, Tidak di Publikasikan, Jakarta, 1995.

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

H.D Stout “de betekenissen van de wet” dalam Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

Hasni, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Herman Malano, Selamatkan Pasar Tradisional:Potret Ekonomi Rakyat Kecil, Gramedia, Jakarta, 2011.

Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

Mardanis, Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Bumi Aksara, Jakarta, 1995.

Muchsan, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Cetakan Pertama, Surabaya, 1993.

Philipus M. Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Cetakan kedua, Yogyakarta, 2003.

Sjahran Basah, Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, Makalah Pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit Universitas Indonesia, 2006.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengaturan, Liberty, Cetakan kedua, Yogyakarta, 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 - 2032

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Keputusan Walikota Padang Nomor 123 Tahun 2015 Tentang Ruang Terbuka Hijau Taman Kota, Jalur Hijau dan Pemakaman Umum

C. Website

https://id.m.wiktionary.org/wiki/jalur_hijau/

<https://satpolppbalikpapan.com/payung-hukum-satuan-polisi-pamong-praja/>

